QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

32. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

33. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan :			
a. Semula	Rp.	968.057.733.675,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.340.158.810,61	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 1.012.397,892.485,61
b. Belanja:			
a. Semula	Rp.	974.617.050.675,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	45.209.753.030,00	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 1.019.826,803.705,00
Surflus/(Defisit) setelah perubahan			Rp. (7.428.911.219,39)
c. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	11.559.317.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.069.594.219,39	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 12.628.911.219,39
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	200.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 5.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp. 7.428.911.219,39
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:			
1. Semula	Rp.	50.280.100.262,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.504.327.223,30	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 73.784.427.485,30

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 678.402.001.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 678.402.001.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 239.375.632.413,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.835.831.587,31	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 260.211.464.000,31

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

a. Semula	Rp. 5.892.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 179.842.491,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 6.071.842.491,00

b. Retribusi Daerah

a. Semula	Rp. 9.190.953.062,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (78.707.650,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 9.112.245.412,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

a. Semula	Rp. 2.600.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 90.273.354,30	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan		Rp. 2.690.273.354,30

d. Zakat

a. Semula	Rp. 2.750.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 62.000.000,00	
Jumlah Zakat Setelah perubahan		Rp. 2.812.000.000,00

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Semula	Rp. 29.847.147.200,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.250.919.028,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan		Rp. 53.098.066.228,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

a. Semula	Rp. 32.500.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
c. Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 32.500.000.000,00

b. Dana Alokasi Umum

a. Semula	Rp.582.668.161.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 582.668.161.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

a. Semula	Rp. 63.233.840.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 63.233.840.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 7.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.323.669.457,00)	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. 1.676.330.543,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp. 13.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.941.615.043,31	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 19.941.615.043,31

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula	Rp. 61.224.595.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.677.886.000,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 79.902.481.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp. 158.151.037.413,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 540.000.001,00	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. 158.691.037.414,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 512.452.686.429,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.981.368.407,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp. 526.434.054.836,00

b. Belanja Langsung sejumlah

1. Semula	Rp. 462.164.364.246,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 31.228.384.623,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 493.392.748.869,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 484.381.956.951,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.202.237.758,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 497.584.194.709,00

b. Belanja bunga

1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. -

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. 700.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 700.000.000,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 8.333.287.478,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 679.108.313,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 9.012.395.791,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 4.421.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 62.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 4.483.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. -

g. Belanja Bantuan Keuangan
   1. Semula Rp. 13.216.442.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.022.336,00
   Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 13.254.464.336,00

h. Belanja Tidak Terduga
   1. Semula Rp. 1.400.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.400.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai
   1. Semula Rp. 63.173.954.026,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.831.142.909,00
   Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 65.005.096.935,00

b. Belanja Barang dan Jasa
   1. Semula Rp. 160.825.814.837,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.998.929.572,00
   Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 188.824.744.409,00

c. Belanja Modal
   1. Semula Rp. 238.164.595.383,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.398.312.142,00
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 239.562.907.525,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah :
   1. Semula Rp. 11.559.317.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.069.594.219,39
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 12.628.911.219,39

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah :
   1. Semula Rp. 5.000.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,00
   Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.200.000.000,00

(2) Penerimaan sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :
   1. Semula Rp. 11.559.317.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.069.594.219,39
   Jumlah silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 12.628.911.219,39
b. Pencairan dana cadangan sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. -

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah.
   1. Semula Rp. 5.000.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,00
   Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 5.200.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2014;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 November 2014 M
27 Muharram 1436 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 November 2014 M
27 Muharram 1436 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SAID AZHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 10